



KINERJA BIROKRASI PADA SITUASI KRISIS SEBAGAI REFLEKSI MENGUKUR REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

Syahran Firdaus¹, Catur Susanto², Halim Dwi Putra³

^{1,2}Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan SDM Aparatur, Kementerian Koperasi dan UKM RI

³English for Business and Professional Communication study program. Politeknik Negeri Bengkalis

*Email Penulis korespondensi: halim@polbeng.ac.id

Abstrak

Kinerja Birokrasi di Indonesia mendapat tantangan besar manakala terjadi situasi pandemik wabah virus Covid-19. Sebagai ujung tombak dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, birokrasi diharapkan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Apalagi dalam situasi krisis yang dihadapi, dampak yang dihasilkan harus segera dirasakan oleh masyarakat terdampak. Menjadi menarik karena, karakter birokrasi selalu diasosiasikan memiliki gerak lambat, kaku, dan cukup rumit. Padahal dalam situasi krisis seperti ini sangat dibutuhkan karakter birokrasi yang koordinatif, adaptif dengan kebutuhan lapangan, serta terukur dalam setiap langkah diambil. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan Agenda Reformasi di Indonesia yang sudah dicanangkan dalam beberapa tahun terakhir dengan kinerja birokrasi dalam merespon krisis akibat wabah pandemik Covid-19 menurut penulis. Adapun metode penelitian dilakukan secara kualitatif dan pengumpulan data melalui pengumpulan data-data sekunder. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi pandanganterhadap agenda reformasi birokrasi di Indonesia saat ini dengan menggunakan konsep Politik Reformasi Birokrasi dan Strong Political Leadership. Kedua konsep ini relevan untuk menjelaskan kekurangan dari perubahan birokrasi yang selama ini sudah dicanangkan.

Kata kunci: Birokrasi, Reformasi Birokrasi, Situasi Krisis, Politik Reformasi Birokrasi, Strong Political Leadership.

Abstract

The performance of the bureaucracy in Indonesia faces a big challenge when the Covid-19 pandemic situation occurs. As the spearhead of a policy issued by the government, the bureaucracy is expected to be run effectively and efficiently. Especially in a crisis situation, the resulting impact must be immediately felt by the affected community. It is interesting because the character of bureaucracy is always associated with slow motion, rigidity, and quite complicated. In fact, in a crisis situation like this, a bureaucratic character that is coordinated, adaptive to field needs, and measurable in every step taken is needed. This aim paper to reflect on the Reform Agenda in Indonesia which has been launched in recent years with the performance of the bureaucracy in responding to the crisis due to the Covid-19 pandemic outbreak. The research method is carried out qualitatively and data collection through secondary data collection. The result this research for reflection that is carried out tries to provide recommendations view on



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



the current bureaucratic reform agenda in Indonesia using the concepts of Bureaucratic Reform Politics and Strong Political Leadership. These two concepts are relevant to explain the shortcomings of the bureaucratic changes that have been planned so far.

Keyword: *Bureaucracy, Bureaucratic Reform, Crisis Situation, Politics of Bureaucratic Reform, Strong Political Leadership.*

Pendahuluan

Sejumlah perkiraan umum potensi penyimpangan yg terjadi pada situasi darurat endemi Covid-19. Potensi penyimpangan itu ada berdasarkan situasi yg tidak menentu sampai lemahnya institusi publik membentuk potensi korupsi (Tempo.com). Hal ini yang menjadi urgensi penelitian ini dilakukan.

Berikut potensi-potensi penyimpangan dalam ketika endemi ini:

1. Kondisi krisis, pandemi, kedaruratan melahirkan prosedur yg bisa memangkas banyak sekali mekanisme. Padahal, mekanisme diharapkan buat mengklaim transparansi. “Di sini potensi penyimpangan jadi terbuka,” istilah Adnan pada telekonferensi, Senin, 18 Mei 2020. Kelangkaan barang dan jasa menciptakan kebijakan impor wajib dilakukan melalui prosedur cepat. Misalnya, pada perkara BUMN, Kimia Farma sebagai institusi yg mempunyai wewenang monopolistik buat mendatangkan produk kesehatan buat pandemi. “Dengan situasi monopolistik dan krisis, praktik-praktik penyimpangan akan terjadi,” ujar Adnan.

Situasi yang tidak menentu membuahkan harga pasar kemungkinan tidak sinkron berdasarkan situasi normal. Adnan menyampaikan hal itu kemungkinan terjadi menjadi dampak adanya. Kewenangan penanganan Covid-19 yang beredar atau tidak terpusat. Karena beredar, potensi penyimpangan. Hal ini akan berbeda apabila konsep penanganannya misalnya yang dilakukan dalam bala tsunami Aceh. Data pemerintah yang tidak seksama atau modern bisa mengakibatkan kekacauan pada implementasi kebijakan. Mulai terlihat banyak sekali macam praktik dan situasi chaos pada lapangan lantaran data tidak seksama dijadikan acuan buat distribusi bantuan. Lemahnya institusi publik membentuk potensi korupsi yang semakin besar pada penanganan bencana wabah Covid-19.

Penelitian ini ini membahas tentang kinerja birokrasi di Indonesia dalam merespon situasi krisis yang diakibatkan oleh wabah Covid-19. Karena fungsinya yang strategis sebagai ujung tombak dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, birokrasi sudah sepatutnya mampu menanggung beban tersebut. Apalagi anggaran negara cukup besar persentasenya yang terserap untuk `menggerakkan` mesin birokrasi. Situasi krisis adalah momentum yang tepat untuk sekedar melihat, sejauh mana birokrasi kita saat ini telah berkembang atau sebaliknya, mengalami gejala stagnansi yang berkepanjangan. Setidaknya, penelitian ini ini mencoba melihat sisi positif dari situasi krisis, yaitu sebagai ujian periodik yang harus dilewati oleh para birokrat.



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



Fenomena pandemic Covid-19 sebenarnya bukan hanya ajang untuk menguji respon dan penanganan yang dilakukan oleh berbagai pemerintahan negara di belahan dunia, akan tetapi untuk menguji struktur birokrasi itu bekerja. Tak terkecuali di Indonesia, penanganan Covid-19 ini menunjukkan kinerja pemerintahan dengan seluruh perangkat dan kewenangan yang dimilikinya. Alih-alih tampak efektif untuk bekerja, pemerintah Indonesia semacam menunjukkan kegagapannya dalam menghadapi fenomena langka ini. Karakter birokrasi di Indonesia yang sangat menekankan pada ide-ide pluralistik serta memberikan ruang pada setiap institusi untuk berinovasi dengan masing-masing tupoksi nya, sepertinya telah menjadi bumerang tersendiri. Pada kondisi dimana kejelasan perintah dan fleksibilitas koordinasi sangat dibutuhkan, struktur birokrasi di Indonesia tidak mampu untuk bersepakat dalam memobilisasi sumberdaya yang ada untuk penanganan Covid-19.

Pandemik ini seakan membuka mata kita melihat betapa lamban dan kakunya kinerja institusi pemerintahan. Sekat antar institusi sangat tebal, hierarki vertikalitas institusi tampak menjadi penghambat, ketidakjelasan arahan dari pusat kekuasaan, serta kemungkinan penggunaan data yang tidak valid. Dari semua penyakit tersebut, sebenarnya adalah bukti bahwa birokrasi kita terjebak pada logika lama pengelolaan institusi. Ego-sektoral terus dipupuk, ketidakmampuan keluar dari sekat hierarki pemerintahan, serta semakin tidak jelasnya proses koordinasi yang harus dilakukan. Birokrasi di Indonesia memang sudah terbiasa dengan koordinasi yang bersifat *top-down*. Substansi koordinasi pun dipersempit hanya sekedar rapat, tatap muka, atau bahkan mendapat disposisi Surat dari atasan. Padahal fungsi koordinasi seharusnya memastikan bahwa si A tahu bahwa si B membutuhkan ini, dan si B tahu bahwa si A bisa melakukan ini dengan segala sumberdaya yang ada. Koordinasi adalah kemampuan untuk mengenali pihak luar dan mengidentifikasi apa yang kemudian harus dilakukan untuk merumuskan skema kerjasama. Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah sebagai berikut: *Bagaimana kinerja birokrasi di Indonesia saat situasi krisis pandemik kaitannya dengan agenda reformasi birokrasi yang sedang berjalan?*

Kajian Pustaka

Dalam bukunya “Birokrasi dalam Masyarakat Modern”, yang dikutip oleh Wahyudi Kumorotomo (1999) dalam Etika Penyelenggaraan Negara, Peter Blau memahami birokrasi sebagai berikut: Birokrasi adalah organisasi yang memaksimalkan efisiensi dalam administrasi sekaligus yang menyarankan agar istilah ini digunakan secara netral untuk mengacu kepada aspek-aspek administratif dari organisasi.

Menurut Max Weber, dikutip Wahyudi Kumorotomo dalam bukunya Etika Penyelenggaraan Negara, manajemen berarti wewenang dan pelaksanaan wewenang. Kekuasaan di sini mungkin berada di tangan birokrat karena mereka telah membenarkan rakyat melalui negara. Dapat



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



disimpulkan bahwa konsep ini pada dasarnya didasarkan pada pengangkatan manajer berdasarkan kemampuan mereka untuk bekerja. Staf administrasi diangkat berdasarkan sistem remunerasi (sistem remunerasi) untuk mendukung urusan publik secara efektif.

Orang, apa pun bentuknya, adalah pendukung utama organisasi mana pun. Perilaku manusia dalam suatu kelompok atau organisasi merupakan awal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi terutama didasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dengan penekanan pada perilaku manusia dalam suatu organisasi. Kerangka dasar area pengetahuan ini didukung oleh setidaknya dua komponen. Ini adalah perilaku organisasi formal sebagai wadah bagi individu dan perilaku mereka. Individu beroperasi dalam organisasi pemerintah, juga dikenal sebagai perangkat. Dalam organisasi ini, peralatan selalu dihadapkan pada birokrasi yang membutuhkan keahlian di masing-masing peralatan. Menurut buku Miftah Thoha (2002), *Pandangan Perilaku Birokratis (Dimensi Dasar Ilmu Administrasi Publik Jilid II)*, definisi perilaku adalah sebagai berikut: Perilaku merupakan fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungan. Ini adalah formula psikologis dan mencakup pemahaman bahwa perilaku seseorang ditentukan tidak hanya oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh tingkat interaksi antara dirinya dan lingkungan.

Interpretasi definisi di atas dapat mencakup bahwa individu dan lingkungannya secara langsung menentukan kedua perilaku tersebut. Individu dan organisasi tidak jauh berbeda dengan makna ungkapan ini. Keduanya memiliki sifat atau sifat tertentu, dan interaksi dari kedua sifat tersebut menimbulkan perilaku individu dalam organisasi.

Menurut Peter M. Blau dan Field Marshal W. Meyer, yang dikutip oleh Wahiudi Kumorotomo (1999) dalam bukunya *Etika Pemerintahan Nasional*, dapat menjelaskan birokrasi sebagai berikut: birokrasi dapat diartikan sebagai berikut: Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun opini peneliti terhadap fenomena diamati. Dengan cara ini, data dari berbagai sumber berita digabungkan dengan fakta tentang berfungsinya aparatur pemerintahan Indonesia dalam keadaan pandemi virus Covid-19 saat ini sehingga menjelaskan dan menganalisis masalah yang ada berdasarkan realitas saat ini berdasarkan sudut pandang penulis. Dari situs resmi pemerintah dan berita berbagai sumber dan fakta menarik diambil kesimpulan yang pasti berdasarkan sudut pandang penulis. Teknologi pengumpulan data menggunakan data sekunder, termasuk berita elektronik baik dari media cetak dan media Massa dan buku perpustakaan, serta data melalui website dan referensi lain yang terkait dengan permasalahan untuk penelitian ini. Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



adalah deskriptif kualitatif dan merupakan studi yang menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk pengamatan terhadap masalah penelitian yang terjadi di lokasi. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan dan menyelidiki topik utama dari variabel pencarian.

Hasil dan Pembahasan

Dengan dalih menjamin kesetaraan, setiap institusi diberikan ruang untuk bergerak dan secepat mungkin melaksanakan kebijakan terbaiknya menangani pandemik ini. Akan tetapi disisi lain, internal institusi juga mengalami ketergantungan terhadap arahan dari pusat. Ruwetnya aturan, banyaknya SOP, serta mekanisme teknis yang telah lama menjangkiti birokrasi kita menyebabkan banyak insitusi yang sangat lamban bertindak. secara tidak langsung ini memperlihatkan bahwa selama ini birokrasi kita hanya `kenyang` dengan berbagai macam produk SOP tidak jelas, alur proses yang ruwet, aturan yang *njlimet*, serta ketidakmampuan membangun koordinasi. Setidaknya ada hikmah yang bisa dipetik dari situasi ini, birokrasi kita adalah tipe birokrasi yang tidak adaptif terhadap kondisi krisis.

Penulis memberikan rekomendasi terhadap agenda reformasi birokrasi di Indonesia saat ini dengan menggunakan konsep Politik Reformasi Birokrasi dan Strong Political Leadership. Melacak Ulang Akar Birokrasi Indonesia

Birokrasi di Indonesia, mendengar kalimat ini diucapkan sebagian besar dari kita telah mampu berimaji secara spontan tanpa harus membedah dan memahami teori birokrasi. Sebagai bagian dari negara pasca-kolonialisme, corak birokrasi kita sedikit banyak sudah terpengaruhi oleh mapannya struktur lama dan belum kuatnya arus reformasi yang dihembuskan. Dulunya, birokrasi adalah instrumentasi dari kerajaan untuk melayani penguasa. Karakter kekuasaan raja yang terkadang berwujud sebagai penguasa tanpa celah. Menurut Geertz, Pemerintah kolonial Belanda dalam memerintah rakyat di negara jajahannya melalui perantaraan kelas atau elite birokrat lokal. Elite birokrasi lokal digunakan dengan pertimbangan latar belakang Kultur keraton sehingga dapat efektif memberikan pengaruh pada efektivitas dan kontrol atas jalannya kebijakan pemerintah kolonial. Masyarakat strata bawah dianggap masih mengikuti Norma budaya kasar. Dengan menggunakan istilah yang dipakai Umar Kayam dan Koentjaraningrat, Geertz mengelompokkan dengan sebutan "priyayi dan wong cilik".

Hal ini mensyaratkan birokrasi saat itu wajib patuh dan tunduk dengan titah sang raja. Corak birokrasi zaman itu biasa kita kenal dengan birokrasi patrimonial. Kekuasaan yang begitu besar menjadi penyebab utama birokrasi tidak bertaji dan cenderung hanya sebagai pelayan sang penguasa. Muncul kemudian relasi yang biasa kita kenal patron-klien. Relasi ini menjadi corak khas yang mewarnai birokrasi dengan pihak penguasa. Rasionalitas birokrasi mustahil untuk dihadirkan karena semuanya menjadi tunduk dan patuh oleh pusat kekuasaan.



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



Arus reformasi tahun 1998, mencoba untuk merubah corak birokrasi patrimonial kearah yang lebih rasional. Reduksi kekuasaan otoritarianisme ala orde baru adalah momentum yang pas untuk melakukan hal tersebut. Apalagi banyak masyarakat yang sudah menganggap birokrasi adalah sarangnya kroni dari penguasa orde baru, oleh karenanya memang diperlukan perubahan secara besar-besaran. Miftah Thoha (2000) misalnya menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang melatarbelakangi perubahan tersebut menjadi penting yaitu adanya keinginan untuk menegakkan demokrasi dengan baik, perubahan sistem politik dari *single majority* ke multi partai, serta arus perkembangan teknologi informasi dan persaingan ekonomi global. Penguatan arus reformasi disertai kuatnya gelombang demokratisasi turut memberi angin segar terhadap birokrasi di Indonesia yang terjebak dengan relasi patrimonialnya. Sistem politik dirancang lebih adaptif terhadap kebutuhan rakyat dengan mengadopsi nilai-nilai pluralistik. Penumpukan kekuasaan yang berujung pada monopoli kekuasaan adalah trauma panjang yang perlu segera dibuatkan obat peredanya. Ide-ide tentang pluralism kemudian menjadi wacana dominan yang berkembang saat itu, tak terkecuali birokrasi, ide ini turut merubah corak patrimonialisme birokrasi menjadi lebih pluralistik.

Akan tetapi yang menjadi masalah saat itu adalah pengembangan birokrasi hanya mentok pada tataran ide. *Roadmap* atau rencana jangka panjangnya tidak tersusun secara jelas dan komprehensif. Akibatnya birokrasi dikembangkan tanpa arah dan terkesan mudah terdikte. Selain itu arus desentralisasi yang belum matang, turut berkontribusi besar terhadap ketidakjelasan arah perubahan birokrasi ini. Alih-alih menjadi lebih efektif dan berpikiran maju, birokrasi saat itu mulai menunjukkan kompleksitas permasalahan. Ego sektoral mulai muncul karena banyaknya satuan kerja dibawah kementerian `naik tingkat` menjadi lembaga negara baru. Salah satu contoh kasus yang cukup menyita perhatian adalah Bulog yang melepaskan diri dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Pada akhirnya, agenda reformasi birokrasi di awal tahun 2000an ditandai dengan tingginya semangat untuk melakukan perubahan akan tetapi tidak disertai dengan kejelasan tujuan yang terarah dan terintegrasi antar institusi birokrasi.

Perkembangan birokrasi saat itu cenderung belum terorganisir dengan baik. Kapasitas aktor politik yang belum memadai serta transformasi struktur besar-besaran yang dilakukan juga turut menjadi penyebab birokrasi belum berkembang. Wacana proposisi tentang birokrasi dan demokrasi banyak didengungkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa, demokrasi membawa kebingungan orientasi untuk birokrasi nantinya. Beberapa ahli belum bersepakat terkait dengan seperti apa kondisi ideal wajah birokrasi kedepannya. Imuwan seperti Hamilton misalnya, lebih meyakini bahwa birokrasi harus diarahkan untuk melindungi warga negara oleh karenanya dibutuhkan administrasi negara yang tersentralistis agar efektivitas kinerja birokrasi lebih terjamin.

Sementara Jefferson memiliki pandangan sebaliknya. Menurutnya birokrasi harus menjamin adanya partisipasi yang luas, desentralisasi yang efektif, serta fokus pada *simplicity*



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



and economic of administration actions. Corak tipologi birokrasi yang dikembangkan oleh Jefferson mengarahkan birokrasi agar menjadi adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Menurut demokrasi memiliki nilai yang sejalan dengan birokrasi karena keduanya berusaha untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi *public affairs* dan menghargai hak-hak individu. Kedua pemikiran ini memang cukup mendominasi dalam penentuan arah demokrasi Indonesia diawal reformasi. Pemikiran lebih moderat terkait ini dikembangkan oleh Madison. Berangkat dari "*faction based vision of society*" Madison menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern akan selalu muncul faksi yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan. Oleh karenanya peranan pemerintah melalui birokrasi adalah sebagai *Institutional Device*. Fungsinya adalah melakukan kontrol dan mediasi terhadap kelompok kepentingan agar penegakan *human liberty* tetap berjalan. Pemikiran Madison ini lebih relevan ketika kita kontekstualisasikan dengan kehidupan demokrasi kita saat ini. Demokrasi menjamin inklusifitas dan kesetaraan warga negara di ruang publik. Oleh karenanya birokrasi diharapkan untuk tidak terjebak dalam salah satu kepentingan kelompok masyarakatnya.

Terlepas dari itu semua, perkembangan birokrasi di Indonesia memang telah sedikit beranjak dari penyakit patrimonialismenya. Akan tetapi progresnya tentu saja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Rumitnya alam demokrasi dan penerapan desentralisasi yang tidak efektif, sangat mempengaruhi kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Karakter birokrasi yang rasional dan independen dari kepentingan kelompok tertentu belum sepenuhnya kita dapatkan. Masih perlu waktu panjang untuk berharap birokrasi berada pada jalan yang ideal.

Wajah Birokrasi dalam Situasi Krisis

Munculnya wabah Covid-19 ini adalah ujian besar bagi wajah birokrasi di Indonesia. Dari kasus ini, setidaknya kita bisa melihat sejauh mana struktur birokrasi itu bekerja, lalu seperti apa pola kerja yang diterapkan, serta seberapa besar dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada situasi krisis seperti ini. Saat kasus pertama ditemukan, pemerintah sudah melakukan ancang-ancang untuk mengarahkan fungsi birokrasi saat itu. Pertama, memastikan ketersediaan data dan informasi dikeluarkan secara satu pintu serta akurasi yang terjaga. Kedua, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan. Ketiga menekan tingkat mobilitas penduduk sebagai upaya preventif penyebaran virus Covid-19.

Miskoordinasi sudah mulai tampak saat pengelolaan data dan informasi kasus Covid-19 diumumkan. Data antara pemerintah pusat dan beberapa pemerintah provinsi berbeda. Kasus ini terjadi pada perbedaan data antara gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketika kebijakan yang seharusnya diputuskan berdasarkan data dan informasi valid, yang terjadi malah kegagalan birokrasi dalam mengelola data tersebut. Suatu kebijakan dapat berjalan efektif apabila antara pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama. Dan pemahaman yang sama tersebut didapatkan apabila arus informasi tersampaikan dengan baik.



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



Masalah lain yang muncul adalah respon pemerintah pusat dalam menekan angka penyebaran juga cenderung lambat. Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan tim gugus percepatan penanganan Covid-19 baru diterbitkan pada 13 Maret 2020 dimana jumlah pasien yang positif sebanyak 69 orang. Lebih ironisnya lagi, pembentukan tim gugus percepatan dipimpin bukan oleh ahli epidemiologi penyakit sehingga mempengaruhi kualitas informasi yang diberikan kepada publik. Publik sehari-hari hanya disuguhkan dengan data jumlah berbagai pasien, akan tetapi tidak pernah mendapat informasi yang cukup untuk pemahaman yang komprehensif terhadap virus ini.

Tidak sampai disitu, perbedatan baru muncul terkait dengan kebijakan yang harus diambil. Beberapa daerah telah menyarankan kepada pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan *lockdown* seperti yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya. Terkait *Lockdown*, Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. UU ini dianggap akan efektif untuk menekan tingkat mobilitas penduduk. Namun pemerintah pusat beranggapan lain dan tidak memiliki jalur tersebut.

Jika kita tilik ke belakang, kegagalan birokrasi dalam menekan jumlah penyebaran virus Covid-19 dikarenakan ketidakmampuan untuk menekan tingkat mobilitas masyarakat khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat perekonomian. Pusat penyebaran virus teridentifikasi melalui penyelenggaraan forum-forum besar yang mengundang orang dari berbagai wilayah. Setidaknya terdapat 4 kluster yang berkontribusi besar terhadap penyebaran covid-19 di awal, yaitu:

1. Penyelenggaraan seminar bisnis syariah di Kota Bogor pada tanggal 25-28 Februari 2020 yang dihadiri sekitar 200 orang. Terdapat 4 orang peserta yang terinfeksi virus bahkan 2 orang diantaranya meninggal dunia
2. Penyelenggaraan seminar keagamaan Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Lembang, Bandung Barat pada tanggal 3-5 Maret 2020. Pendeta di Gereja tersebut dinyatakan positif dan meninggal dunia. Setelah dilakukan tes terhadap 637 jemaat yang mengikuti kegiatan tersebut, sebanyak 226 dinyatakan positif covid-19.
3. Persidangan Sinode Tahunan GPIB di Kota Bogor yang berlangsung 26-29 Februari 2020. Kegiatan ini dihadiri sekitar 600 orang, dimana terdapat 19 orang yang berasal dari Kota Bandar Lampung terinfeksi virus. Walikota Bogor yang sebelumnya sudah dinyatakan positif juga turut menghadiri acara ini.
4. Penyelenggaraan persidangan Musyawarah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 9-10 Maret 2020. Kegiatan ini dihadiri sekitar 400 orang dan terdapat 7 orang yang terinfeksi virus. Wakil Walikota Bandung, Bupati Karawang, dan Walikota Bogor terinfeksi virus ketika menghadiri kegiatan ini.
5. Penyelenggaraan Ijtima Ulama Dunia Zona Asia di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini mengundang 8.283 WNI dari berbagai daerah dan 478 WNA dari 9 negara.



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



Meski kegiatan ini pada akhirnya dibatalkan, akan tetapi para peserta sudah terlanjur datang. Sehingga menyulitkan pemerintah daerah untuk menekan angka penyebaran virus covid-19.

Kebijakan yang lamban dari pemerintah pusat, setidaknya telah memicu banyak perdebatan di tingkat daerah. Banyak daerah yang mencoba mendahului pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan *lockdown*. Beberapa kepala daerah merasa yakin dengan `modal` otonomi daerah yang mereka miliki, kebijakan pembatasan wilayah yang mereka lakukan dijamin oleh hukum. Salah satu contoh yang terjadi adalah kebijakan penutupan akses di Kota Tegal.

Di tengah situasi yang semakin rumit dan masalah baru banyak yang muncul, pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan yang lebih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengatur semuanya. Jika kita merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020, status kesiagaan masih di pada status `keadaan tertentu darurat bencana`. Padahal WHO telah berkirin surat kepada Presiden Jokowi pada 10 Maret 2020 untuk menekan Presiden menetapkan status darurat nasional (Istilah WHO adalah *Scale Emergency Response Mechanism Including Declaration of National Emergency*). Hal ini menjadi penting, karena ketika peningkatan status ini dilakukan tentu akan memudahkan BNPB untuk melakukan proses koordinasi dan pencegahan secara lebih terintegrasi. Pasal 24 di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa BNPB (dan BPBD) mendapatkan kemudahan akses di demikian banyak bidang, mulai dari penerahan SDM, penerahan peralatan dan logistik, mengatur imigrasi dan cukai, kemudahan pengadaan barang dan jasa, serta kemudahan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang. Dan yang juga sangat penting: pemberian hak komando untuk memerintahkan semua instansi dan lembaga, termasuk kementerian-kementerian dan personil militer.

Dengan status masih `keadaan tertentu` pejabat birokrat di BNPB tentu saja akan kesulitan untuk mengatur segala upaya pencegahan dengan insititusi lainnya. Akses dari Kepala BNPB sebagai Ketua Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 menjadi terbatas. BNPB masih harus mendapat persetujuan dari kementerian terkait jika ingin mengeluarkan kebijakan. Rumitnya koordinasi birokrasi di tingkat pusat, juga semakin diperparah dengan banyaknya daerah yang berinisiatif untuk melakukan karantina wilayah tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Walaupun dengan segala keterbatasan, Pemerintah pusat sebenarnya menyadari hal ini. Berbagai insentif dilakukan seperti penyederhanaan aturan, realokasi anggaran, optimalisasi informasi dan data satu pintu, serta menyiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Akan tetapi kembali ke poin awal, penyakit yang menjangkiti birokrasi kita saat ini adalah hasil akumulasi dari `kenyamanan` yang terlalu berlebihan sehingga membuat mereka malas untuk bergerak secara progresif. Rangkaian insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya sebagai `obat murah` yang efeknya hanya sesaat. Setelah itu, mereka akan kembali pada kultur lamanya yang kaku, ruwet, dan lamban.



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



Struktur birokrasi kita memang sedang diuji terkait dengan kondisi krisis seperti ini. Sistem birokrasi yang plurastik memang akan cocok untuk kondisi ideal dimana fleksibilitas koordinasi, pertukaran ide, dan kemampuan berinovasi dapat diterapkan. Kondisi seperti ini memang sangat mendukung arus demokratisasi karena menanggapi semua institusi memiliki kecakapan dan kapasitas untuk berkembang. Akan tetapi berbeda halnya kasus krisis saat ini, pemerintah pusat sudah harus menegakkan dan memperluas kewenangannya untuk menertibkan birokrasi yang ada untuk penanganan pandemik. Mustahil untuk merubah kondisi birokrasi saat ini untuk lebih adaptif dengan situasi krisis. Yang perlu dilakukan adalah memodifikasi struktur yang ada dan memanfaatkan hierarki birokrasi ini untuk meningkatkan kepatuhan.

Sentralistik kekuasaan mungkin solusi yang terdengar cukup aneh, tapi ini adalah hal yang paling mungkin untuk dilakukan sekarang. Solusi ini bukan untuk melegitimasi bahwa sentralisasi kekuasaan adalah kebutuhan, akan tetapi melihat kondisi birokrasi Indonesia yang begitu carut marut, memang diperlukan kekuasaan yang terpusat agar semua pihak dapat berjalan beriringan. Kepatuhan adalah kebutuhan yang sangat urgen. Dan kepatuhan tersebut bisa didapatkan dengan ketegasan dari pusat kekuasaan dalam memberikan arahan serta menyederhanakan aturan main yang lebih jelas. Sentralistik ini tetap harus disokong dengan koordinasi yang fleksibel. Arahan dari pemerintah pusat kepada seluruh tingkatan pemerintahan harus disisipi dengan inisiatif untuk terus menjalin koordinasi antar institusi. Pembagian peran dan kewenangan harus mulai dilakukan, ego-sektoral sudah harus dihilangkan, SOP atau aturan main yang ruwet dan kompleks harus mulai disederhanakan.

Selain itu, memastikan keterlibatan sektor private dan *Civil Society* adalah alternatif yang dapat dioptimalkan. Mengingat besarnya sumberdaya yang mereka miliki, tentu akan sedikit mengurangi beban pemerintahan yang ada. Apalagi dalam kondisi krisis seperti dimana solidaritas sosial sudah didapatkan. Pemerintah dapat memanfaatkan solidaritas tersebut untuk diarahkan ke penanganan kasus pandemic ini. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa, jangan sampai keterlibatan sektor private dan *civil society* ini membuat pemerintah harus terdikte oleh kepentingan mereka. Pemerintah harus menjadi pionir kekuasaan dan memastikan koordinasi terus berjalan.

Politik Reformasi Birokrasi

Terlepas dari saat ini kita sedang dilanda situasi krisis, harus diakui bahwa kondisi birokrasi kita memang kurang ideal. Alih-alih mengajak untuk melakukan perubahan, perubahan itu sendiri yang kemudian bingung mereformulasikan substansinya untuk menyegarkan wajah birokrasi kita. Kondisi krisis sebenarnya menjadi momentum bagi kita semua untuk melihat bahwa negara ini membutuhkan percepatan perubahan birokrasi. Kesulitan terbesar untuk merubah birokrasi adalah kebutuhan akan komitmen politik dan peningkatan kompetensi untuk reformasi birokrasi. Rendahnya komitmen politik adalah pangkal dari rumitnya menyederhanakan seluruh proses dalam birokrasi. Di Indonesia, proses reformasi birokrasi



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



terjebak pada logika teknis-administratifnya. Padahal kerumitan birokrasi adalah hasil persinggungannya dengan banyak entitas politik yang menyebabkannya sulit untuk independen. Berbagai intervensi politik dalam berbagai macam wujudnya telah menjadikan birokrasi bukan lagi sebagai wadah untuk melayani kepentingan publik.

Mungkin negara ini pernah mencatat beberapa proyek besar untuk melakukan reformasi. Kementerian Keuangan misalnya mencoba untuk mengubah wajah kaku birokrasi dengan 'membongkar ulang' proses remunerasi. Mengingat selama ini lambannya birokrasi kita karena kurang ditekannya para aparatur pemerintahan untuk berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. Mekanisme atur ulang penggajian ini dianggap cara paling efektif untuk menghidupkan kembali mesin birokrasi. Akan tetapi lambat laun, proyek remunerasi yang harus terdikte dengan kondisi birokrasi yang sudah mapan.

Secara historis, birokrasi adalah representasi dari hasil kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Mulai struktur, nilai, substansi, dan prinsip yang melekat didalamnya memang terbiasa untuk memenuhi kepentingan penguasa daripada melayani kepentingan publik. Birokrasi seakan-akan terjebak pada nuansa tradisionalisme ala kerajaan sebagai instrumen 'menyenangkan' atasannya. Birokrasi dengan karakteristik kolonialisme ini memang diarahkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu. Oleh karenanya wajar apabila wajah birokrasi perwujudan dari wajah oligarki yang misinya adalah mempertahankan sumber daya dan kekuasaan yang dimilikinya. Birokrasi dalam konteks politik memang menjadi instrument yang sangat efektif untuk mengontrol perilaku masyarakat dengan melimpahnya kewenangan yang diberikan serta besar legitimasi yang dimiliki.

Sejarah di Indonesia pernah mencatat bagaimana wajah birokrasi kita tercampuradukkan dengan kekuatan politik mayoritas yaitu Partai Golkar di masa orde baru. Seluruh mekanisme, alur pelayanan, pengisian pos jabatan strategis, hingga perumusan program dan kebijakan terkooptasi dari partai Golkar. Wajah ganda birokrasi disini menjadi semakin jelas karena terjebak pada kepentingan politik praktis secara vulgar. Birokrasi menjadi sangat adaptif dengan berbagai kepentingan politik aliran serta mulai melemahkan fungsi pelayanan publiknya kepada masyarakat. Kalaupun masih terdapat fungsi pelayanan publik hal tersebut hanya sebagai birokrasi tampak seolah-olah berfungsi untuk masyarakat.

Padahal jika kita lihat saat ini, pemerintahan modern sudah harus menginjeksi nilai-nilai modernitas pada birokrasi. Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat yang sudah terspesialisasi pada macam-macam bidang, serta massifnya arus teknologi informasi adalah beberapa pokok perubahan yang seharusnya menjadi acuan untuk melakukan reformasi birokrasi. Yang perlu untuk digaris bawahi adalah upaya reformasi birokrasi ini membutuhkan komitmen politik yang tinggi. Politik reformasi birokrasi adalah hal kompleks karena harus melibatkan serangkaian proses, aktor-aktor yang bervariasi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



beberapa teori dijelaskan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan dukungan dari para pejabat terpilih (*elected official*).

Ketika memunculkan ide politik reformasi birokrasi ini, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana dikotomi antara politik dan birokrasi itu dihadirkan. Di satu sisi birokrasi butuh menjaga independensinya untuk tidak terlibat dengan kepentingan politik praktis kelompok tertentu. Tapi disisi lain, birokrasi juga membutuhkan *political will* dari para aktor politik yang bewenang. Reyes dalam penelitian ininya berjudul "*Bureaucracy and Transition: Some Reflections on Redemocratization and Politics Administration Dichotomy*" menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara sistem politik dan agenda reformasi birokrasi. Pada tahap awal, agenda reformasi birokrasi idealnya bersinggungan dengan *power arrangement* karena terkait dengan penataan struktur birokrasi dan konfigurasi kelembagaan. Perubahan orientasi birokrasi seharusnya dimaknai sebagai upaya mediasi berbagai kelompok kepentingan yang menghendaki perubahan proses administrasi pemerintahan yang demokratis. Prasyarat dari implementasi skema ini adalah ada kematangan gagasan dari publik tentang nilai-nilai demokrasi pada pembenahan struktur birokrasi. Skema reformasi birokrasi dengan singgungan kuat dari aspek politik ini akan menuju kearah perbaikan sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan untuk mempertahankan ruang dialog diantara berbagai argumentasi kepentingan sehingga akan menciptakan keseimbangan dari banyaknya kelompok kepentingan.
2. Terciptanya mekanisme perwakilan di setiap kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masalah publik
3. Memastikan bahwa opini publik memiliki pengaruh sehingga setiap perencanaan yang diambil baik jangka pendek maupun panjang berada di jalur yang dikehendaki publik
4. Terlaksananya proteksi terhadap hak dasar dan penegakan hukum.

Agenda reformasi birokrasi sudah seharusnya tidak hanya fokus pada pembenahan aspek administratifnya semata. Karena hulu permasalahannya ketika kita ingin memperbaikinya adalah dengan memastikan bahwa aspek politik juga dipertimbangkan didalamnya. Kompleksitas skema reformasi birokrasi semacam ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang, akan tetapi efeknya pun nantinya akan bertahan lama. Perubahan birokrasi adalah hal mutlak yang harus segera diupayakan. Prosesnya pun tidak boleh tergesa-gesa dan hanya memikirkan deretan angka diatas kertas, akan tetapi lebih daripada itu, perlu untuk berpikir bahwa perubahan birokrasi harus dimulai dari akarnya.

Strong Political Leadership

Politik reformasi birokrasi adalah kunci untuk kemudian dapat mengarahkan birokrasi itu sebagai pelayanan kepentingan masyarakat. Walaupun disisi lain, atas dasar politik juga birokrasi dapat menjadi sangat menjauh dari kepentingan masyarakat. Pada penelitian ini ini, penulis mengajukan sebuah konsep yaitu *Strong Political Leadership* sebagai sebuah mekanisme untuk



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



mendorong terjadinya percepatan reformasi birokrasi. Kepemimpinan politik yang kuat adalah salah satu faktor kunci melaksanakan reformasi birokrasi.

Beberapa daerah telah menjadi contoh bagaimana karakter kepemimpinan kemudian sangat mempengaruhi birokrasi. Di Provinsi DKI Jakarta kita mengenal Ahok sebagai salah satu pemimpin politik yang galak dan tidak senang dengan alur birokrasi yang dianggapnya terlalu ruwet. Karakter Ahok yang sangat sering menekankan terhadap percepatan reformasi birokrasi bisa dilihat dari upayanya untuk mengubah karakter lamban dan kaku dari para aparatur pemerintahan. Tingkat disiplin menjadi sangat tinggi, kemudahan pelayanan publik melalui reformulasi aturan dan SOP yang dipangkas, serta implementasi teknologi informasi untuk memudahkan proses integrasi dan koordinasi antar OPD yang ada. Ahok adalah representasi pemimpin yang sudah lama bersinggungan dengan kondisi birokrasi jika kita melihat jejak politiknya. Posisinya sebagai seorang pemimpin daerah tentu saja menjadi momentum baginya untuk merubah secara massif birokrasi.

Sama halnya dengan di Jakarta, Kota Surabaya juga menjadi objek percontohan yang sangat menarik melalui karakter Walikota nya yaitu Tri Rismaharini. Setali tiga uang dengan Ahok, Risma juga melakukan banyak gebrakan terhadap penyegaran reformasi birokrasi di Kota Surabaya. Akan tetapi poin lebihnya disini, Risma adalah pemimpin yang lahir dan besar di Kota Surabaya sehingga jauh lebih mendalami konteks sosio-kultural di daerahnya. Rasa keterikatan masyarakat Kota Surabaya juga cukup tinggi karena mereka beranggapan bahwa Risma adalah representasi ideal dari identitas tentang Surabaya.

Dari dua kisah singkat diatas sebenarnya dapat tarik poin penting bahwa terkadang untuk melakukan penyegaran birokrasi dibutuhkan ketegasan dan *Political Will* yang tinggi dari pemimpin politik. Kesadaran atas urgensi reformasi birokrasi ini memang harus diawali dengan memastikan bahwa pemimpin politiknya memiliki ketegasan dan *political will* untuk reformasi birokrasi. Sebuah Dinas di daerah tidak akan pernah maju walaupun seluruh pegawainya sudah berkomitmen untuk berubah akan tetapi tidak didukung dengan pemimpin atau Kepala Dinas.

Wajah birokrasi saat ini sangat kuat dengan struktur yang sangat hierarkis, alur yang menuntut koordinasi vertikalitas, proses yang rumit, dan tidak adaptif dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Hal ini disebabkan birokrasi diisi berbagai macam tingkatan serta spesialisasi bidang yang sangat banyak. Hingga pada akhirnya birokrasi adalah manifestasi sentralisasi kuasa dari aktor yang berkuasa. Oleh karenanya, penulis beranggapan bahwa upaya yang jangka pendek yang dapat dilakukan saat ini adalah memastikan proses pengisian jabatan pemimpin politik yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi.

'Warisan' sentralisasi di internal birokrasi memang membutuhkan waktu yang agak panjang untuk dirubah. Birokrasi kita sudah mapan dan stabil dengan pola gerak seperti itu. Yang perlu dilakukan saat ini adalah adanya pemimpin politik layaknya Ahok dan Risma. Terlepas



Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
P-ISSN: 1410-3133. E-ISSN: xxxx-xxxx



bahwa kedua pimpinan ini telah menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi gerak-geriknya selama di internal pemerintahan cukup untuk `menggertak` lamban dan kakunya birokrasi saat ini.

Sebenarnya upaya alternatif lain yang dapat dilaksanakan adalah regulasi pemerintahan. Berbeda dengan argumen sebelumnya yang lebih menekankan terhadap penguatan karakter kepemimpinan politik, upaya ini lebih menekankan pada upaya pendisiplinan aparatur pemerintahan melalui kerangka regulasi yang ada. Skema perekrutan, penempatan, penggajian dan promosi jabatan adalah beberapa variabel yang harus dikaji lebih mendalam. Hal ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi kooptasi kekuatan politik praktis untuk menunggangi birokrasi dalam melaksanakan kepentingannya. Pada akhirnya birokrasi memang akan selalu bersinggungan dengan berbagai kepentingan politik, tapi yang perlu dipastikan bahwa persinggungan itu tidak menyebabkan intervensi yang membuat birokrasi kembali menjadi instrumentasi kepentingan politik. Upaya reformasi birokrasi membutuhkan perbaikan pada dua hal yaitu, mengurangi persinggungan dengan kepentingan politik praktis serta menguatkan kapasitas dan karakter internal birokrasi agar tidak kaku dan lamban.

Penutup

Kinerja pelaksanaan birokrasi dalam menghadapi situasi krisis akibat kondisi pandemik Covid-19 ini belum optimal. Beberapa indikasi yang terlihat adalah ketidakmampuan birokrasi dalam mengelola dan menyampaikan data serta informasi kepada masyarakat. Akibatnya adalah masyarakat cenderung menerima banyak informasi yang tidak valid. Ketidajelasan pengelolaan arus informasi ini berdampak pada perbedaan persepsi antara birokrasi dan masyarakat. Tentu saja hal ini mengakibatkan legitimasi akan semakin berkurang karena kebijakan yang diterapkan oleh para birokrat dianggap tidak relevan oleh masyarakat.

Gejala lainnya yang ditunjukkan adalah lemahnya fungsi koordinasi yang berdampak pada kesemrawutan dan tumpang tindih pelaksanaan kewenangan antar instansi. Padahal dalam kondisi krisis, diperlukan tingkat pemahaman yang baik dan implementasi yang selaras antar instansi. BNPB sebagai institusi birokrasi yang ditunjuk untuk `memimpin` kendali penanganan situasi krisis ini tidak dapat berbuat banyak. Karena setiap upaya dan kebijakan yang dikeluarkan masih harus melewati banyak koordinasi dengan berbagai instansi. Akibatnya adalah langkah-langkah yang diambil tidak dapat secepat dieksekusi.

Berangkat dari hal tersebut, penulis melihat bahwa agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan belum menunjukkan hasilnya. Perubahan birokrasi yang dilakukan hanya menyentuh proses administratifnya semata tanpa memberikan dampak langsung. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis menawarkan dua konsep alternatif untuk mengatasi kemandekan agenda reformasi birokrasi yaitu politik reformasi birokrasi dan *strong political leadership*. Kedua konsep ini menjadi relevan karena sesuai dengan karakter birokrasi di Indonesia yang cenderung terjebak pada perubahan yang hanya bersifat teknis-administratif semata tanpa



memikirkan aspek politiknya. Padahal hulu dari permasalahan terkait reformasi birokrasi adalah memastikan adanya *political will* dari para aktor yang berwenang. Tentu saja dengan menciptakan mekanisme relasi kuasa yang menunjang nilai-nilai yang demokratis.

Saran peneliti selanjutnya mencari antasadent dan outcome alasan alasan utama penyimpangan birokrasi yang terjadi di Indonesia terhadap pandemi global ini.

Daftar Pustaka

- Blau, P. M. (1987). *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: UI Press.
- Carino, L. V. (1994). *Bureaucracy for Democracy, The Dynamics of Executive Bureaucracy Interaction During Governmental Transitions*. College of Public Administration, University of the Philippines.
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Edinger, L. J. (1993). *A Preface to Studies in Political Leadership*, in G. Sheffer (Ed.). New York: Albany State University of New York Press.
- Geertz, C. (1983). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Green, R. T., & Hubell, L. (1996). *On Governance and Reinventing Government*. Sage Publications.
- Margono, S. A. (1998). Birokrasi, Demokrasi, dan Reformasi: Sudut Pandang Administrasi Negara. *Jurnal Sosial Politik* Vol.2, No.2, 47-66.
- Okhtariza, N. (30 Maret 2020). Perkuat Mandat BNPB dan Pertajam Komunikasi Penanganan Covid-19, *CSIS Commentaries*. pp. 1-4.
- Toha, M. (2000). Reformasi Birokrasi Publik Pasca Orde Baru: Perubahan tanpa Grand Design. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 70-91.
- Uveges, J. A. (1982). *Public Administration, History and Theory in Contemporary Perspective*. New Jersey: Marcel Dekker, Inc.
- Vermonte, P. (9 April 2020). Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia: Temuan Awal, *CSIS Commentaries*. pp. 1-12.
- Widaningrum, A., & Mas`udi, W. (2020). *Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19*. In W. Mas`udi, & P. S. Winanti, Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal (pp. 46-63). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <https://nasional.tempo.co/read/1343648/potensi-potensi-penyimpangan-penanganan-wabah-covid-19-kata-icw/full&view=ok>